



PENGUMUMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Februari 2025/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIT KERJA : UNIVERSITAS GADJAH MADA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RINA SRI KASIAMDARI
2. Jabatan : KETUA PROGRAM STUDI PROFESI KURATOR KEANEKARAGAMAN HAYATI
3. NHK : 741394

II. DATA HARTA

		Rp.	
A. TANAH DAN BANGUNAN		2.762.000.000	
1.	Tanah dan Bangunan Seluas 116 m ² /70 m ² di KAB / KOTA KOTA YOGYAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000		
2.	Tanah Seluas 1 m ² di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000		
3.	Tanah Seluas 69 m ² di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000		
4.	Tanah dan Bangunan Seluas 101 m ² /57 m ² di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 562.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN		322.000.000	
1.	MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR SOLO Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000		
2.	MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR SOLO Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 17.000.000		
3.	MOBIL, HONDA MINIBUS Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA		52.500.000	
D. SURAT BERHARGA		---	
E. KAS DAN SETARA KAS		Rp. 1.228.420.910	
F. HARTA LAINNYA		---	
Sub Total		Rp. 4.364.920.910	

**III. HUTANG****IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**

Rp.

4.364.920.910

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.